

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG  
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2007**

Tesis

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Magister (Strata Dua)  
Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Oleh :

**CAHYA RIANA SUKSONOWARSI**

**2014-02-003**

---

**PASCASARJANA ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG  
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

Disusun Oleh :

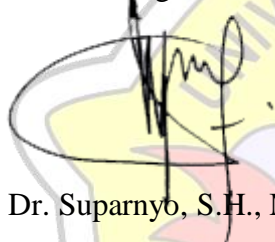
CAHYA RIANA SUKSONOWARSI

2014-02-003

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

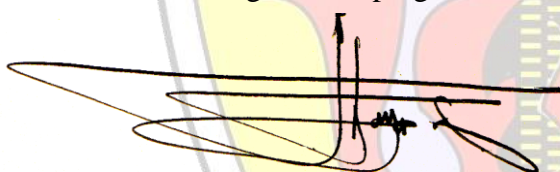
Pada tanggal Desember 2017

Pembimbing Utama,



Dr. Suparno, S.H., M.S

Pembimbing Pendamping



Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Sukresno, SH. M.Hum

Anggota Dewan Penguji II



Suciningtyas, SH. M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal .....



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahya Riana Suksonowarsi

N I M : 2014-02-003

Alamat : Desa

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Januari 2017

Yang membuat pernyataan

Materai  
6000

Cahya Riana Suksonowarsi

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas RidhoNya dan melimpahkan rahmatNya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Magister Ilmu Hukum (S2) dengan konsentrasi Hukum publik pada Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus sekaligus selaku pembimbing utama tesis
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus sekaligus pembimbing pendamping.
4. Bapak Dwi Joko Kristanto Kepala Kantor Pajak Pratama Demak yang telah memberi ijin survey kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.
5. Semua staf dan karyawan Kantor Pajak Pratama Demak yang telah membantu penulis melengkapi data penelitian.
6. Semua staff pegawai atau Karyawan Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil

Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan maklum adanya.

Kudus, Januari 2017

Penulis

Cahya Riana Suksonowarsi



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka*

*(Q.S. Ar Ra'du : 11)*

*Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan*

*(Ali bin Abi Talib)*

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan untuk :*

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta*
- 2. Suami tercinta*
- 3. Anak-Anak Tercinta*
- 4. Civitas Akademika Universitas Muria Kudus*
- 5. Sahabat-sahabatku semua*

## ABSTRACT

*Taxes are a source of income and state income, which the state uses to finance all expenditures, including development expenditures. Therefore, the source of state revenues from taxes should be increased, so that the need of community participation in the financing of development is reflected in the compliance of the people in paying taxes. Efforts to increase tax revenues and to make Taxpayers compliant in paying taxes, the government issued Law No. 28 of 2007 on Third Amendment to Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (hereinafter referred to as the KUP Law) administrative sanctions and criminal sanctions for Taxpayers who do not pay taxes intentionally, and for Taxpayers who report their taxes are inconsistent with realities on the ground.*

*This type of research is included in the type of descriptive analytical research with empirical juridical approach method to see in full the problem of research sourced from the primary data and secondary data as supporting data. The data were collected by field study (interview) and literature study, the data obtained were analyzed qualitatively and presented in descriptive form.*

*The results of this study can be seen that the regulation of criminal sanctions for taxpayers in the Law on KUP, regulated starting Article 41A, 41B, 41C and Article 42 in the articles as mentioned clearly and explicitly, namely penalty sanction penalties and fines for rogue taxpayers. The application of criminal sanctions in taxation solely to make the Taxpayer obedient. The application of the criminal law in the case of tax crime is intended for individual Taxpayer and Koorporasi who do offense. Review advantages / advantages and disadvantages / disadvantages of using criminal law in tax law in order to increase tax revenue. The advantage is to be a deterrent effect for Taxpayers, reduce the number of crimes and violations in the field of Taxation and the target of state revenue from Taxes can be achieved. The weakness is the limited Human Resources investigators Civil Servants within the Directorate General of Taxation, the lack of socialization of tax criminal law, the weakness of the provisions of criminal tax in the Law on KUP and Taxpayers become more careful.*

**Keywords:** *Government Policy and Application of Tax Criminal Law*

## ABSTRAK

Pajak adalah sumber penghasilan dan pendapatan negara, yang oleh negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu, sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan, sehingga di perlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak dan untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya ditulis UU KUP), memuat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dengan sengaja, dan bagi Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan *yuridis empiris* untuk melihat secara lengkap permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana bagi Wajib pajak dalam UU KUP, diatur mulai Pasal 41A, 41B, 41C dan Pasal 42 dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut secara jelas dan tegas, yaitu sanksi pidana kurungan dan denda bagi Wajib Pajak yang nakal. Penerapan sanksi pidana dalam perpajakan semata-mata untuk membuat Wajib Pajak menjadi Patuh. Penerapan hukum pidana pada kasus tindak pidana perpajakan, diperuntukkan bagi Wajib Pajak perseorangan dan Koorporasi yang melakukan delik. Kajian keuntungan / kelebihan dan kelemahan / kerugian penggunaan hukum pidana dalam hukum pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Keuntungannya yaitu menjadi efek jera bagi Wajib Pajak, mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran dibidang Perpajakan dan target penerimaan negara dari Pajak dapat tercapai. Kelemahannya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kurangnya sosialisasi hukum pidana pajak, kelemahan aturan ketentuan pidana pajak dalam UU KUP dan Wajib Pajak menjadi lebih berhati-hati.

**Kata Kunci** : *Kebijakan Pemerintah dan Penerapan Hukum Pidana Pajak*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS) .....	vi
ABSTRAK (DALAM BAHAS INDONESIA) .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Pemikiran .....	15
1. Kerangka Konseptual .....	10
a. Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang .....	
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran Pajak .....	16
b. Pemungutan Pajak dan Target Penerimaan Pajak .....	



Oleh Negara .....	17
1. Pungutan Pajak .....	17
2. Target Penerimaan Pajak Negera .....	18
c. Wajib Pajak Tidak Melaporkan Pajaknya .....	18
d. Penerapan Sanksi .....	19
1. Sanksi Pidana .....	19
2. Sanksi Administrasi .....	20
e. Peradilan Pajak .....	34
f. Target Pendapatan Dari Sektor Pajak Tercapai .....	34
2. Kerangka Teoritis .....	35
F. Metode Penelitian .....	37
1. Pendekatan Masalah .....	38
2. Spesifikasi Penelitian .....	39
3. Populasi dan Penentuan Sampel .....	39
4. Metode Pengumpulan Data .....	40
5. Metode Analisis Data .....	43
G. Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	46
1. Pengertian Tentang Pajak .....	46
2. Dasar hukum Pajak .....	48
3. Fungsi Pajak .....	48
4. Jenis-Jenis Pajak .....	50

5. Asas-Asas Pajak .....	52
B. Pemeriksaan Pajak .....	54
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak .....	54
2. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak .....	57
3. Tujuan Pemeriksaan Pajak .....	58
C. Hukum Pemeriksaan Pajak .....	58
D. Penerapan Sanksi Terhadap Wajib Pajak .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Tinjauan Umum Kantor Pelayanan Pajak pratama Demak ....	64
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak .....	64
2. Visi dan Misi .....	64
B. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam UU KUP .....	67
C. Penerapan Hukum Pidana Pajak Pada Kasus Tindak .....	
Pidana Perpajakan .....	79
1. Delik Pidana Yang Dapat Dilakukan Oleh.....	
Wajib Pajak Badan Dalam UU KUP .....	86
2. Timbulnya Tindak Pidana Perpajakan dan Tahapan .....	
Penanganan Perkara Tindak Pidana .....	90
2.1. Timbulnya Perkara .....	90
2.2. Penyidikan .....	91
2.3. Tahapan Penanganan Perkara Tindak Pidana .....	93
2.3.1. Pra Peradilan .....	94
a. Bukti Awal .....	94

b. Alat Bukti .....	95
2.3.2. Penyidikan Tindak Pidana Pajak .....	98
2.3.3. Penagihan Pajak .....	102
2.3.4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	106
2.3.5. Lelang .....	108
2.3.6. Peradilan Pajak .....	109
D. Kajian Keuntungan/Kelebihan dan Kelemahan/Kerugian .....	
Penggunaan Hukum Pidana Dalam Hukum Pajak Dalam .....	
Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak .....	115
1. Keuntungan/Kelebihan Penerapan Hukum Pidana .....	
di Bidang Perpajakan .....	116
2. Kelemahan Penerapan Hukum Pidana di Bidang .....	
Perpajakan .....	117
BAB IV PENUTUP .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	